

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pembangunan suatu negara tidak dapat terpungkiri dari adanya masalah kemiskinan yang merupakan salah satu faktor penghambat dan belum dapat diatasi serta menjadi perhatian utama pemerintah. Suatu negara yang mempunyai permasalahan kemiskinan yang tinggi selalu dihadapkan oleh beberapa permasalahan mengenai pertumbuhan penduduk yang tidak dapat terkendali serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Tingginya tingkat kemiskinan membuat pemerintah mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk pembangunan ekonomi sehingga hal tersebut tentunya akan dapat menghambat pembangunan ekonomi (Safuridar & Putri, 2019). Todaro dan Stephen (2006) menjelaskan bahwa permasalahan kemiskinan ini paling banyak dirasakan pada negara berkembang yang pertumbuhan penduduknya tinggi diiringi dengan tingginya pertumbuhan ekonomi namun tidak dapat memberikan manfaat kepada penduduk mereka yang miskin. Kemiskinan merupakan salah satu kondisi terbelakangnya sumber daya manusia yang menyebabkan produktivitas seseorang rendah. Apabila hal ini terjadi secara berangsur-angsur maka akan menyebabkan kemiskinan tingkat tinggi dikarenakan tidak mampunya seseorang akan modal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Presentase penduduk miskin terutama di Indonesia memiliki ketimpangan yang tinggi antara di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini tentunya menjadi fokus utama pemerintah dalam pemerataan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Subandi (2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan tinggi akan menyebabkan berbagai permasalahan serta faktor yang menghambat dalam proses pembangunan ekonomi. Adanya hal tersebut menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada

suatu wilayah apabila tidak dapat ditemukan solusi dari permasalahan tersebut.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa dengan tingkat kemiskinan ke-4 di Pulau Jawa. Tabel berikut menjelaskan tentang presentase penduduk miskin yang terdapat di Pulau Jawa.

**Tabel 1. Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2020 (Persen)**

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DKI Jakarta	4.09	3.61	3.75	3.78	3.55	3.42	4.69
Jawa Barat	9.18	9.57	8.77	7.83	7.25	6.82	8.43
Jawa Tengah	13.58	13.32	13.19	12.23	11.19	10.58	11.84
DI Yogyakarta	14.55	13.16	13.10	12.36	11.81	11.44	12.80
Jawa Timur	12.28	12.28	11.85	11.20	10.85	10.20	11.46
Banten	5.51	5.75	5.36	5.59	5.25	4.94	6.63

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

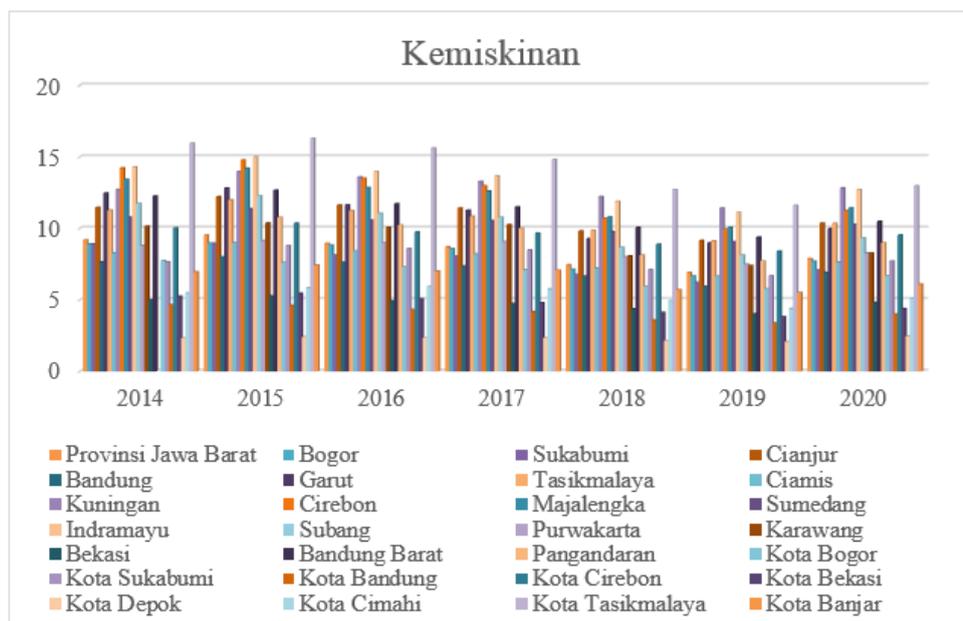
Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan yaitu tingkat kemiskinan di 6 Provinsi yang terletak Pulau Jawa mengalami kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. Provinsi Jawa Barat berada pada posisi ke 4 dengan presentase penduduk miskin paling banyak di Pulau Jawa setelah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Terlihat dari tahun 2014-2015 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat meningkat dari 9.18% menjadi 9.57%. Adanya peningkatan ini dikarenakan adanya kenaikan pada harga barang kebutuhan pokok yang disebabkan adanya peningkatan pada beberapa harga bahan bakar minyak. Presentase angka kemiskinan dari tahun 2015 hingga 2019 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat terus menurun setiap tahunnya. Penurunan angka kemiskinan ini salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat. Namun penurunan ini hanya berhenti di tahun 2019 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 dari 6.82% menjadi 8.43%.

Peningkatan kemiskinan ini terjadi karena adanya pandemi *Covid-19* dimana tidak sedikit pekerja yang mengalami PHK sehingga mereka tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan

menyebabkan jumlah penduduk miskin yang menetap pada suatu wilayah meningkat.

Kemiskinan yang tinggi di Provinsi Jawa Barat dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti salah satunya adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Provinsi Jawa Barat namun hal ini tidak diselaraskan dengan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan banyak penduduk yang menganggur. Tercatat hingga tahun 2020 Provinsi Jawa Barat menempati posisi ke-3 dengan pengangguran tertinggi di Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan pengangguran masih belum dapat teratasi dengan baik. Provinsi Jawa Barat dengan total keseluruhan sebesar 27 Kab/Kota memiliki presentase tingkat kemiskinan yang berbeda setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik 1 di bawah ini:

**Grafik 1. Kemiskinan di Kab/Kota Jawa Barat  
Tahun 2014-2020 (Persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dilihat pada grafik 1 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif setiap tahunnya. dilihat

pada grafik 1 di atas menyebutkan bahwa setiap tahunnya tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada Kabupaten Bogor serta tingkat kemiskinan terendah terdapat pada Kota Banjar. Tingkat kemiskinan yang tertinggi terdapat di Kabupaten Bogor terlihat dari tahun 2019 sebesar 5.98% yang meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 6.14%. Peningkatan ini disebabkan karena tingginya angka pertumbuhan penduduk serta banyak masyarakat yang menganggur di Kabupaten Bogor. Sedangkan Kota Banjar dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sebesar 2.31% dan mengalami peningkatan juga ditahun 2020 menjadi 2.42%. Namun dengan adanya peningkatan ini, Kota banjar tetap menjadi wilayah yang menyumbang tingkat kemiskinan paling rendah di Provinsi Jawa Barat disebabkan karena angka pertumbuhan penduduk di wilayah ini kecil sehingga potensi terjadinya kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja juga kecil. Sehingga jumlah tenaga kerja yang menganggur juga rendah dan tingkat kemiskinan pada Kota Banjar relatif lebih rendah.

Adanya angka kemiskinan yang tinggi akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti pengangguran yang semakin meningkat, menurunnya kualitas sumber daya manusia dikarenakan terbatasnya kemampuan seseorang dalam mengakses pendidikan, serta berbagai permasalahan sosial lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki angka kemiskinan yang tinggi di Pulau Jawa. Dengan adanya permasalahan pada kemiskinan tertinggi ke 4 di Pulau Jawa serta pertumbuhan penduduk paling tinggi No. 1 di Pulau Jawa ini yang menjadikan fenomena serta alasan peneliti memilih Provinsi Jawa Barat sebagai subjek penelitian. Selain itu Provinsi Jawa Barat dimana terdapat beberapa daerah industri seperti pada Karawang dan Bekasi seharusnya dapat meningkatkan angka pendapatan dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun nyatanya masih belum dapat mengatasi permasalahan kemiskinan karena angka kemiskinannya masih lebih tinggi dari DKI Jakarta dan Banten yang menempati 2 provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Jawa.

Pertumbuhan penduduk menjadi tolak ukur utama dalam melihat pengaruh kemiskinan suatu daerah. Dalam teorinya Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari adanya proses pembangunan. Namun dari adanya pertumbuhan penduduk ini tidak dapat terjadi tanpa adanya peningkatan pada kesejahteraan suatu masyarakat yang sejalan. Malthus juga menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara akumulasi modal yang meningkat dengan pertumbuhan ekonomi. Malthus menjelaskan bahwa adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan mengakibatkan kemiskinan yang parah (Lulu, 2017). Dimana jika akumulasi pada modal mengalami peningkatan maka permintaan akan tenaga kerja juga mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan terbukanya lapangan pekerjaan maka akan membuat seseorang tidak memiliki pekerjaan yang nantinya seseorang tersebut akan menganggur. Jika hal ini tidak diatasi dengan baik maka dapat menciptakan permasalahan seperti kemiskinan.

Provinsi Jawa Barat dengan total keseluruhan Kab/Kota sebanyak 27 Kab/Kota masing-masing memiliki presentase kemiskinan yang berbeda. Seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2. Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) dan Kemiskinan (Persen) di Jawa Barat Tahun 2014-2020**

Tahun	Pertumbuhan Penduduk	Kemiskinan
2014	46.029	9,18
2015	46.709	9,53
2016	47.379	8,95
2017	48.037	8,71
2018	48.683	7,45
2019	49.316	6,91
2020	49.935	7,88

Sumber: Badan Pusat Statistik

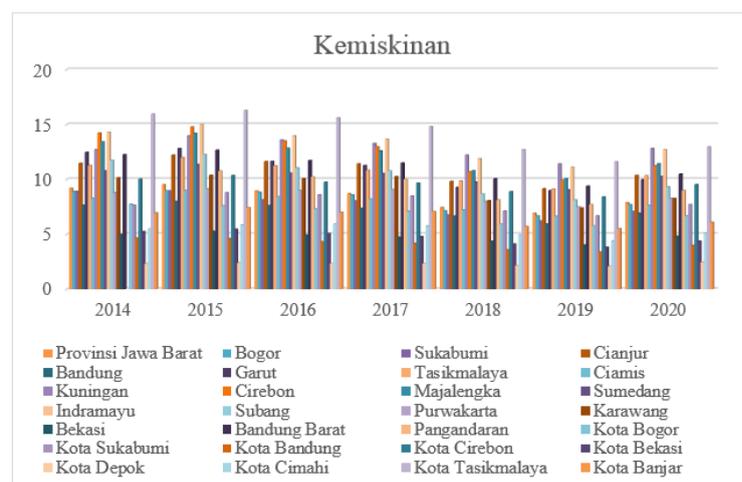
Dilihat dari tabel 2 jumlah pertumbuhan penduduk dan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2020 menjelaskan angka pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan begitupun dengan kemiskinan yang meningkat pada tahun 2014 serta tahun 2015 dari 9.18%

menjadi 9.53%. Namun tingkat kemiskinan pada tahun 2016 kemiskinan mengalami penurunan dan terhenti di tahun 2019. Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 7,88% serta jumlah penduduk juga mengalami peningkatan menjadi 49.935 juta jiwa. Peningkatan ini dapat disebabkan dari adanya pandemi *Covid-19* dimana pemerintah memberlakukan pembatasan kerja kepada perusahaan. Banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar selama masa pandemi *Covid-19* sehingga banyak pekerja yang diberhentikan dari pekerjaan mereka sehingga mereka menjadi menganggur hal ini yang menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami peningkatan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Malthus dengan adanya peningkatan pada jumlah penduduk setiap tahunnya tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan. Namun hal ini tidak tercerminkan di Provinsi Jawa Barat yang ketika jumlah penduduk terus meningkat namun tingkat kemiskinan justru menurun pada tahun 2015-2019 dimana hal ini bertentangan dengan teori dan menjadi gap pada penelitian ini.

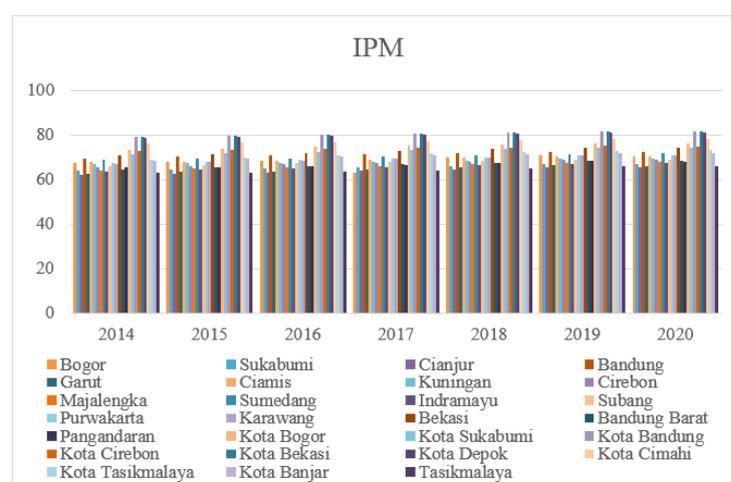
Ragnar Nurkse (1963) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan teori lingkaran setan kemiskinan dimana terdapat adanya kondisi pasar yang tidak sempurna, kemampuan modal yang kurang serta adanya keterbelakangan pada kualitas SDM yang mengakibatkan terjadinya produktivitas yang rendah. Rendahnya tingkat produktivitas seseorang akan mengakibatkan rendahnya pendapatan mereka dan akan berimbas ke menurunnya investasi serta tabungan. Apabila tingkat pendapatan seseorang terus menurun maka akan mengakibatkan terjadinya kemiskinan yang disebabkan tidak cukupnya modal untuk kebutuhan hidup sehari-hari. IPM menggambarkan perbaikan pada pembangunan manusia yang dilihat dari adanya perbaikan pada sistem kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya tingkat IPM maka akan membuat produktivitas seseorang tersebut rendah dimana hal ini akan mengurangi pendapatan dan nantinya akan menyebabkan semakin tingginya jumlah penduduk miskin.

Indikator lain yang menjadi tolak ukur dalam melihat angka kemiskinan adalah dengan melihat IPM. Dimana IPM ini menjadi satu hal yang penting guna melihat keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia suatu daerah. Menurut BPS (2020) IPM menggambarkan tentang sejauh mana seseorang dalam mencapai tujuan akhir dari pembangunan manusia yang meliputi pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Faktor pembentuk IPM meliputi usia yang panjang serta hidup yang sehat, tingkat pengetahuan, serta standar hidup yang layak.

**Grafik 2. Kemiskinan (Persen) dan IPM (Persen) di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan Grafik 2 yang menggambarkan tentang Kemiskinan dan IPM yang terdapat di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2020

Paramita Retno Indriati, 2021

**PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, IPM, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

meningkat setiap tahunnya. Peningkatan pada IPM ini menjelaskan bahwa kualitas SDM pada Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan tinggi. Adapun angka IPM tertinggi di Provinsi Jawa Barat terdapat pada Kota Bandung dimana pada tahun 2014 sebesar 78.98% dan meningkat ditahun 2015 sebesar 79.67%. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2019 yaitu sebesar 81.62% dan menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 81.51% walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun Kota Bandung tetap menduduki peringkat pertama dengan IPM tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya wilayah dengan IPM paling tinggi kedua di Provinsi Jawa Barat terdapat pada Kota Depok yang mencapai 80.97% ditahun 2020 dan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 80.82%. Adanya peningkatan pada IPM ini didorong dengan adanya perbaikan pada standar hidup masyarakat yang layak, adanya perbaikan pada sektor pendidikan juga yang menyebabkan terjadinya peningkatan IPM.

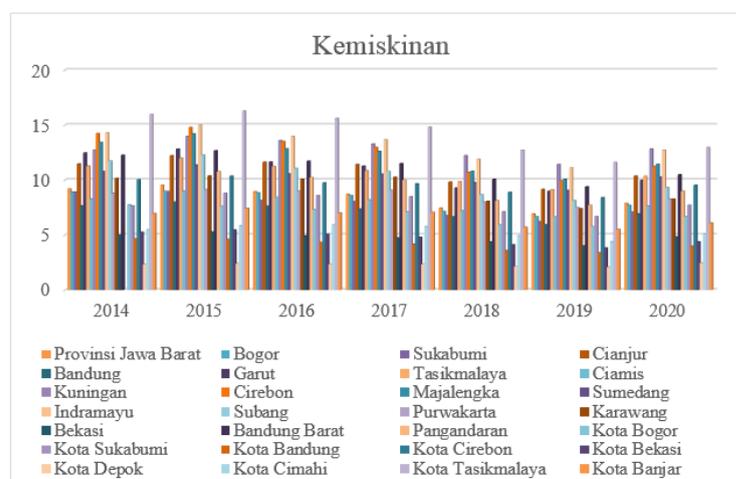
Adapun terdapat IPM terendah di Provinsi Jawa Barat yaitu pada Kabupaten Cianjur yang pada tahun 2020 hanya sebesar 65.36% angka ini menjadi angka terendah pada presentase IPM di Provinsi Jawa Barat. Dilihat secara keseluruhan dari tahun 2015-2019 IPM seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat meningkat dan tingkat kemiskinan yang menurun dari tahun sebelumnya dimana hal ini sesuai dengan teori yang ada apabila kualitas SDM tersebut tinggi maka akan dapat meningkatkan produktivitas seseorang yang dimana akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Tetapi pada tahun 2014-2015 IPM di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat meningkat seperti pada Kabupaten Bogor yang mengalami peningkatan dari 67.35% pada tahun 2014 menjadi 67.77% ditahun 2015 namun kemiskinan justru mengalami peningkatan juga yaitu pada tahun 2014 sebesar 8.91% menjadi 8.96% pada tahun 2015.

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan yang mengalami kenaikan pada tahun 2015 tersebut dapat memberikan gap yang bertentangan dengan teori. Teori Nurkse menjelaskan apabila kualitas

seseorang yang meliputi pendidikan, umur panjang, serta standar hidup yang layak ini dapat menyelamatkan seseorang dari kondisi terjebak dalam kemiskinan. Karena jika semakin tingginya pendidikan individu maka akan dapat meningkatkan produktivitas mereka dan akan menambah angka pendapatan seseorang tersebut. Adanya gap pada kemiskinan dan IPM pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yustie, 2017) pada variabel IPM memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa dengan meningkatnya kualitas pendidikan individu belum tentu langsung akan mendapat pekerjaan yang mereka inginkan dimana hal ini akan meningkatnya angka pengangguran dan mengakibatkan kemiskinan.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pengangguran. Unsur penting dalam melihat apakah masyarakat dikatakan makmur apabila tingkat pendapatan yang mereka peroleh setiap bulannya tinggi dan dapat mencukupi untuk kebutuhannya. Jika tingkat pendapatan seseorang mencapai batas maksimum maka sudah terwujudnya tingkat penggunaan tenaga kerja *fullemployment* (Agustina, 2018). Adanya angka pengangguran yang tinggi dapat menjadi faktor yang besar dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.

**Grafik 3. Tingkat Kemiskinan (Persen) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Kab/Kota Jawa Barat Tahun 2014-2020**



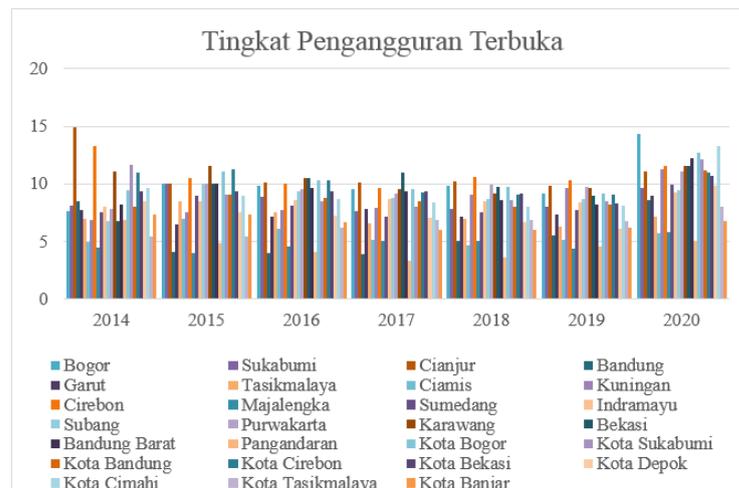
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Paramita Retno Indriati, 2021

**PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, IPM, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Jika dilihat pada grafik 3 di atas menunjukkan angka pengangguran di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2020 mengalami kondisi fluktuasi setiap tahunnya. Presentase TPT paling tinggi di Provinsi Jawa Barat terdapat pada Kabupaten Bogor. TPT pada tahun 2014-2015 meningkat dari 7.65% menjadi 10.01% ditahun 2015. Terlihat pada tahun 2016-2017 yang mengalami penurunan dimana masing-masing sebesar 9.78% dan 9.55%. Namun terjadi kenaikan di tahun 2018 menjadi 9.83% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 9.11%. Adanya penurunan ini dipengaruhi dengan adanya jumlah angkatan kerja yang meningkat yang diikuti dengan TPAK yang mengalami peningkatan. Adanya peningkatan dalam lapangan usaha seperti pada industri pengolahan, real estate, dan informasi & komunikasi yang menjadi faktor pendorong dalam perbaikan ketenagakerjaan serta faktor yang dapat menurunkan angka pengangguran.

Peningkatan pesat pada TPT di Kabupaten Bogor terjadi pada tahun 2015 dan 2020 dimana masing-masing peningkatan sebesar 10.01% dan 14.29%. Adanya peningkatan pada tahun 2015 ini disebabkan karena industri yang bergantung dengan impor melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawannya karena adanya penghematan pada biaya produksi yang berakibat kenaikan pada nilai tukar, serta pengurangan pada tenaga kerja. Selain itu peningkatan ditahun 2020 disebabkan karena adanya

pandemi *Covid-19* yang menyebabkan beberapa individu kehilangan pekerjaannya dan meningkatkan angka pengangguran di Kabupaten Bogor.

Selain itu terdapat juga wilayah dengan tingkat TPT paling rendah di Provinsi Jawa Barat yaitu terdapat pada Kabupaten Pangandaran. Tercatat dari tahun 2014-2017 angka pengangguran menurun dari 6.85% pada tahun 2014 menjadi 4.81% ditahun 2015 serta 4.07% pada tahun 2016 dan menurun kembali 3.34% ditahun 2017. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2018 hingga 2020 masing-masing sebesar 3.59%, 4.52%, dan 5.08%. Meskipun mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir tetapi Kabupaten Pangandaran menjadi penyumbang angka pengangguran paling rendah di Provinsi Jawa Barat.

Jika dilihat secara keseluruhan rata-rata TPT di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 dan 2018 mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun tersebut yang mengalami penurunan tetapi angka pengangguran justru malah meningkat dimana jika dibandingkan dengan teori yang dicetuskan oleh Ragnar Nurkse yang menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki pendapatan yang rendah maka hal tersebut akan berakibat penurunan pada tingkat kemakmuran seseorang. Dimana jika tingkat kemakmuran atau kesejahteraan seseorang itu rendah disebabkan karena menganggur maka seseorang tersebut akan terjebak ke dalam kemiskinan dikarenakan tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika dibandingkan dengan kondisi yang terdapat di Kab/Kota Jawa Barat dimana jika pengangguran meningkat tetapi angka kemiskinan menurun pada tahun tersebut. Hal ini yang menjadikan gap pada penelitian ini karena tidak sejalan dengan teori Ragnar Nurkse. Adanya gap antara kemiskinan dan TPT pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Safuridar & Putri, 2019) dimana pada variabel pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Adanya hubungan negatif diantara kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Aceh dan Kota Langka disebabkan karena fenomena adanya individu yang

tidak memiliki pekerjaan atau menganggur tidak selamanya terjebak ke dalam kemiskinan jika mereka masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Walaupun kebutuhan hidup mereka masih tergantung kepada orang yang bekerja/memiliki pekerjaan namun individu tersebut tidak dapat mempengaruhi kemiskinan.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Tingginya angka kemiskinan di Kab/Kota Jawa Barat menjadi perhatian utama pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut. Padahal jika dilihat dari segi laju IPM Provinsi Jawa Barat sudah termasuk tinggi dan lebih baik jika disandingkan dengan 6 Provinsi lainnya yang terletak di Pulau Jawa namun pemerintah tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut. Jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap tahunnya diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran pada Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

3. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang positif baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi/pedoman guna melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembuktian dari Teori Ragnar Nurkse mengenai lingkaran setan kemiskinan dan Teori Malthus mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan.
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi pemerintah, guna dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan yang tepat guna mengurangi kemiskinan dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bertambahnya kemiskinan sehingga permasalahan kemiskinan dapat diatasi.
  - b) Bagi masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan diharapkan masyarakat dapat mengurangi pengangguran sehingga akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.